



BADAN PUSAT STATISTIK



POTENSI

Desa Kepoh

2024-2025



KATA PENGANTAR

Publikasi Potensi Desa merupakan publikasi yang berisi data dan indikator strategis mengenai kondisi dan potensi yang ada di desa/kelurahan. Data dan indikator terkait kondisi dan potensi desa/kelurahan diperoleh dari hasil kegiatan pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 dan 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari data identitas desa, kondisi geografis, infrastruktur, kondisi sosial, bencana alam serta potensi perekonomian. Selain itu publikasi ini juga berisi data dari desa/kelurahan terkait beberapa pertanyaan yang sering dikumpulkan oleh K/L/D/I lain.

Publikasi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data. Tanggapan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di edisi yang akan datang.

Kepoh, Juli 2026
Kepala Desa Kepoh



Udayasa

DAFTAR ISI

A.	Perumahan dan Lingkungan Hidup	4
1.	Penggunaan Listrik	4
2.	Penerangan Jalan Utama	6
3.	Bahan Bakar Memasak	8
4.	Kejadian dan Pengaduan Pencemaran	9
5.	Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Lingkungan	11
B.	Infrastruktur Komunikasi dan Informasi.....	14
1.	Keberadaan Menara BTS, Sinyal Telepon Seluler, dan Internet di Desa Kepoh	14
1.1.	Keberadaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	14
1.2.	Ketersediaan Operator Layanan Komunikasi	15
C.	Ketersediaan Fasilitas Aksesibilitas Dasar	18
1.	Fasilitas Pendidikan.....	19
1.3.	Fasilitas Sekolah Dasar (SD/MI)	19
1.4.	Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	20
1.5.	Fasilitas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/MA/SMK) ..	21
2.	Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan	25
2.1.	Fasilitas dan Sarana Kesehatan.....	25
2.2.	Tenaga Kesehatan	26
3.	Fasilitas Perdagangan dan Ekonomi	30
3.1.	Industri Mikro, Kecil, dan Jasa Ekonomi	30
3.2.	Industri Mikro, Kecil, dan Jasa Ekonomi	31

Sekilas Pendataan Potensi Desa

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Podes dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari dan jorong di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi atau UPT, dan Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait).

Pengumpulan data Podes dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui situs web.

Potensi Desa Kepoh

A. Perumahan dan Lingkungan Hidup

1. Penggunaan Listrik

Akses terhadap sumber energi listrik merupakan salah satu indikator vital dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan kesiapan infrastruktur dasar suatu wilayah. Berdasarkan pemutakhiran data Pendataan Potensi Desa (PODES), perkembangan penggunaan listrik di Desa Kepoh menunjukkan dinamika yang positif.



Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Gambar 1. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik PLN di Desa Kepoh 2024-2025

Cakupan layanan kelistrikan di Desa Kepoh menunjukkan tren perluasan yang positif dan cukup pesat. Berdasarkan data

ketersediaan layanan, jumlah keluarga yang menggunakan listrik dari jaringan PLN pada tahun 2024 mencapai 825 keluarga. Setahun berselang, pada tahun 2025, angka tersebut melonjak secara signifikan menjadi 903 keluarga.

Pertambahan sebanyak 78 keluarga, atau tumbuh sebesar 9,45% ini, merupakan indikator yang sangat baik bagi perluasan infrastruktur dasar di tingkat desa. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pemerataan akses energi, tetapi juga mengindikasikan adanya dinamika pertumbuhan jumlah rumah tangga maupun pemukiman baru di wilayah Desa Kepoh selama satu tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik di Desa Kepoh 2024-2025

Kelompok	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Keluarga Pengguna Listrik PLN	825	903
Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN	2	19
Jumlah Keluarga Bukan Pengguna Listrik	18	4

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Ketersediaan dan perluasan akses energi di tingkat desa menunjukkan capaian elektrifikasi yang sangat progresif sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pengguna layanan kelistrikan sekaligus penyusutan pada kelompok masyarakat yang belum teraliri listrik.



Penggunaan listrik yang bersumber dari jaringan PLN masih mendominasi dan terus tumbuh secara signifikan, dari 825 keluarga menjadi 903 keluarga. Di sisi lain, inisiatif penggunaan sumber listrik mandiri atau Non-PLN juga memperlihatkan pertumbuhan, dari yang semula hanya 2 keluarga pada 2024, bertambah menjadi 19 keluarga pada 2025.

Keberhasilan pemerataan infrastruktur dasar ini paling jelas tercermin dari penurunan drastis pada jumlah keluarga yang belum menikmati akses listrik. Angkanya berhasil ditekan dari 18 keluarga pada tahun 2024 menyusut tajam hingga menyisakan 4 keluarga pada tahun 2025. Penurunan angka ini, yang terjadi di tengah bertambahnya total jumlah keluarga secara keseluruhan, mengindikasikan bahwa akses energi bagi masyarakat desa sudah semakin inklusif dan merata.

2. Penerangan Jalan Utama

Fasilitas penerangan di jalan utama desa merupakan salah satu prasarana pendukung keselamatan lalu lintas dan mobilitas warga. Ketersediaan dan sumber energi penerangan jalan di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 2 berikut.



Tabel 2. Keberadaan dan Sumber Penerangan di Jalan Utama Desa Kepoh 2024–2025

Indikator	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Keberadaan Penerangan Jalan Utama	Ada, Sebagian Kecil	Ada, Sebagian Kecil
Sumber Penerangan Utama	Listrik diusahakan oleh pemerintah (PLN)	Listrik diusahakan oleh pemerintah (PLN)

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Dari sisi kebutuhan domestik, akses energi masyarakat sudah terfasilitasi secara konsisten. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, sumber penerangan utama masyarakat tetap tidak berubah, yakni sepenuhnya mengandalkan pasokan listrik yang diusahakan oleh pemerintah melalui jaringan PLN.

Sementara itu, ketersediaan infrastruktur penerangan untuk fasilitas umum belum menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan cakupan. Pada tahun 2024, keberadaan penerangan jalan utama tercatat dengan status "Ada, Sebagian Kecil", dan status tersebut masih bertahan pada tahun 2025. Stagnasi pada indikator ini mengindikasikan bahwa belum terdapat penambahan titik lampu jalan yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sehingga fasilitas penerangan yang memadai baru mencakup sebagian kecil dari total jalan utama di wilayah desa tersebut.

3. Bahan Bakar Memasak

Bahan bakar yang digunakan rumah tangga untuk memasak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur pola konsumsi energi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan penggunaan bahan bakar utama untuk memasak di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Bahan Bakar Utama untuk Memasak Sebagian Besar Keluarga di Desa Kepoh 2024–2025

Indikator	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Bahan Bakar Utama Memasak	LPG 3 kg	LPG 3 kg

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 3, bahan bakar utama yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di Desa Kepoh tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2024–2025, yaitu tetap bertumpu pada LPG 3 kg (Elpiji 3 kg). Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi dari masyarakat Desa Kepoh terhadap bahan bakar gas bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan energi harian rumah tangga. Ketersediaan pangkalan/agen LPG yang memadai di wilayah desa turut mendukung konsistensi penggunaan LPG 3 kg sebagai komoditas energi utama masyarakat.

4. Kejadian dan Pengaduan Pencemaran

Data indikator lingkungan hidup menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap kualitas lingkungan di desa antara tahun 2024 dan 2025. Secara umum, telah terjadi degradasi kualitas lingkungan yang mencakup tiga elemen utama, yaitu air, tanah, dan udara.

Tabel 4. Kejadian, Sumber, dan Pengaduan Pencemaran Lingkungan di Desa Kepoh 2024–2025

Jenis Pencemaran	Indikator	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Air	Kejadian Pencemaran	Tidak Ada	Ada
	Sumber Utama	-	Pabrik/Industri/Usaha
	Pengaduan Warga	-	Tidak Ada
Tanah	Kejadian Pencemaran	Tidak Ada	Ada
	Sumber Utama	-	Pabrik/Industri/Usaha
	Pengaduan Warga	-	Tidak Ada
Udara	Kejadian Pencemaran	Tidak Ada	Tidak Ada
	Sumber Utama	-	-
	Pengaduan Warga	-	-

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025



Kualitas lingkungan hidup di desa menunjukkan adanya dinamika perubahan antara tahun 2024 dan 2025, dengan munculnya isu pencemaran pada elemen lingkungan tertentu. Secara keseluruhan, terjadi degradasi kualitas pada media air dan tanah, sementara kualitas udara masih relatif terjaga.

Pada tahun 2024, kondisi lingkungan terpantau sangat baik, ditandai dengan tidak adanya laporan kejadian pencemaran sama sekali pada ketiga indikator utama (air, tanah, dan udara). Namun, pada tahun 2025, teridentifikasi adanya kejadian pencemaran yang memengaruhi kualitas air dan tanah. Berdasarkan data, sumber utama pencemaran pada kedua media lingkungan tersebut sama, yakni berasal dari aktivitas operasional Pabrik/Industri/Usaha di sekitar wilayah desa.

Berbeda dengan kondisi air dan tanah, kualitas udara di desa pada tahun 2025 tetap terjaga dengan baik dan tidak mencatatkan adanya kejadian pencemaran maupun paparan polusi dari sektor industri. Dari sisi respons sosial kemasyarakatan, terdapat temuan yang perlu menjadi catatan. Meskipun pencemaran dari aktivitas industri telah nyata terjadi dan berdampak pada ekosistem air dan tanah pada tahun 2025, tidak terdapat satupun pengaduan atau keluhan formal yang masuk dari warga masyarakat. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi efektivitas saluran pengaduan publik atau mengukur tingkat pemahaman warga terhadap dampak lingkungan hidup.

5. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Lingkungan

Pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim mencerminkan upaya aktif masyarakat serta pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Perkembangan kegiatan pelestarian lingkungan di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Iklim di Desa Kepoh 2024–2025

Jenis Kegiatan Pelestarian Lingkungan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Penanaman/Pemeliharaan Pepohonan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
Pengolahan/Daur Ulang Sampah	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
Penggunaan Pupuk Organik	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Profil pelestarian lingkungan hidup di wilayah desa menunjukkan kondisi yang sepenuhnya stagnan dan belum menjadi fokus pergerakan masyarakat. Berdasarkan data perbandingan antara tahun 2024 dan 2025, ketiadaan inisiatif pelestarian ini terlihat secara merata pada seluruh indikator ekologis yang diamati.

Selama dua tahun berturut-turut, desa ini tidak mencatatkan adanya aktivitas penghijauan seperti penanaman maupun pemeliharaan pepohonan. Kondisi serupa juga terjadi pada aspek



tata kelola kebersihan dan inovasi pertanian, di mana sama sekali tidak teridentifikasi adanya kegiatan pengolahan atau daur ulang sampah, serta nihilnya aktivitas penggunaan pupuk organik.

Absennya seluruh indikator pelestarian lingkungan ini dapat menjadi catatan penting dan ruang evaluasi bagi perencanaan pembangunan desa ke depan, terutama untuk mulai menginisiasi program-program dasar yang mendorong kesadaran dan partisipasi warga terhadap pelestarian ekosistem di lingkungan sekitar.



INFORMASI & KOMUNIKASI 2024-2025

Sebagian besar warga

warga yang menggunakan telepon seluler/handphone

Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah Desa Kepoh

Kuat



Terdapat

2

menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS) :



Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di Desa Kepoh

5G/4G/LTE



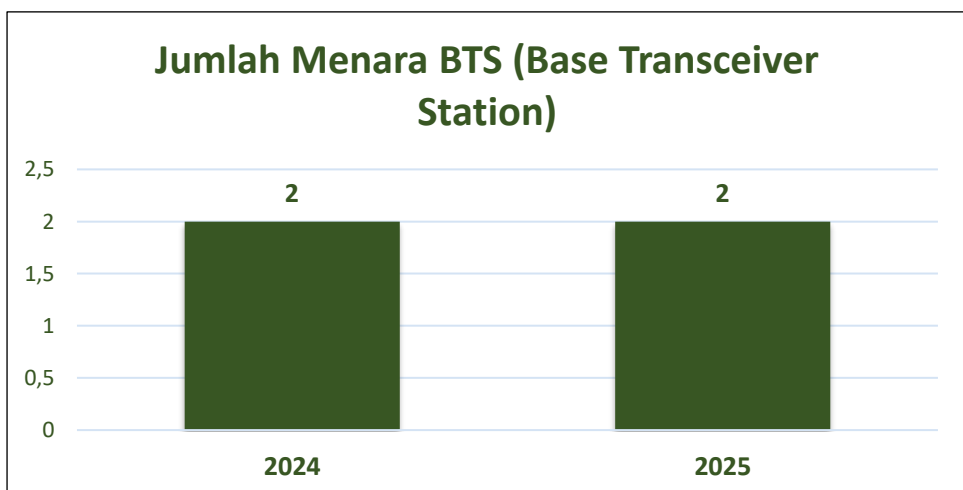
B. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

1. Keberadaan Menara BTS, Sinyal Telepon Seluler, dan Internet di Desa Kepoh

Ketersediaan infrastruktur komunikasi serta kualitas sinyal telekomunikasi dan internet merupakan prasarana vital dalam mendukung konektivitas warga, digitalisasi pelayanan desa, serta pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Perkembangan ketersediaan menara telepon seluler (BTS), kondisi sinyal telepon, dan jangkauan internet seluler di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan sebagai berikut.

1.1. Keberadaan Menara Base Transceiver Station (BTS)

Menara *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan sarana fisik penerima dan pemancar gelombang telekomunikasi nirkabel yang menentukan daya jangkauan jaringan di suatu wilayah.



Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Gambar 2. Jumlah Menara BTS di Desa Kepoh 2024-2025

Pada periode pendataan 2024 hingga 2025, jumlah menara BTS yang berlokasi dan beroperasi di wilayah Desa Kepoh tercatat stabil sebanyak 2 unit menara BTS. Keberadaan 2 unit menara pemancar ini menjamin pemerataan jangkauan jaringan nirkabel hingga ke area permukiman warga terluar dan kawasan sentra produksi desa.

1.2. Ketersediaan Operator Layanan Komunikasi

Keberagaman operator telekomunikasi yang menjangkau suatu wilayah memberikan pilihan akses jaringan bagi masyarakat sekaligus menciptakan kompetisi iklim usaha telekomunikasi yang sehat. Berdasarkan data PODES 2024–2025, ketersediaan jaringan operator seluler di Desa Kepoh stabil dan terjangkau luas.



Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Gambar 3. Jumlah Operator Layanan Komunikasi di Desa Kepoh 2024-2025



Berdasarkan grafik ketersediaan layanan komunikasi, jumlah operator yang beroperasi di desa mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 4 operator telekomunikasi yang melayani wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2025, angka tersebut menyusut menjadi 3 operator, yang berarti terdapat pengurangan 1 penyedia layanan komunikasi dalam kurun waktu satu tahun.

20
25

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 2025



0 SMA/SEDEREJAT

0 SMP/SEDEREJAT

2 SD/SEDEREJAT

0 TK/SEDERAJAT



JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2025



1 PUSKESMAS
PEMBANTU

1 POSKESDES/
POLINDES

3 POSYANDU AKTIF

0 APOTEK



Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

20
24

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 2024



0 SMA/SEDEREJAT

0 SMP/SEDEREJAT

2 SD/SEDEREJAT

0 TK/SEDERAJAT



JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2024



1 PUSKESMAS
PEMBANTU

1 POSKESDES/
POLINDES

3 POSYANDU AKTIF

0 APOTEK



Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

C. Ketersediaan Fasilitas Aksesibilitas Dasar

1. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan prasarana vital dalam mendukung pemerataan serta kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Ketersediaan unit sekolah di wilayah desa tidak hanya menjamin hak anak atas pendidikan dasar, tetapi juga mengurangi biaya transportasi dan risiko perjalanan siswa. Pada bagian ini, pembahasan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ketersediaan unit sekolah di dalam desa dan tingkat aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan terdekat.

1.3. Fasilitas Sekolah Dasar (SD/MI)

Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang awal dalam pembentukan kemampuan literasi dan numerasi anak usia sekolah. Ketersediaan dan jumlah unit fasilitas SD dan MI menurut status pengelolaannya di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Jumlah Fasilitas Pendidikan SD/MI Menurut Status Pengelolaan di Desa Kepoh 2024–2025

Jenjang Pendidikan	2024 (Negeri)	2024 (Swasta)	2025 (Negeri)	2025 (Swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah Dasar (SD)	2	0	2	0
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0	0	0	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 6, seluruh fasilitas Sekolah Dasar yang berada di wilayah Desa Kepoh berstatus Negeri (dikelola oleh pemerintah). Pada periode 2024–2025, jumlah fasilitas SD Negeri tercatat stabil sebanyak 2 unit, tanpa keberadaan SD swasta maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Keberadaan 2 unit SD Negeri di Desa Kepoh menunjukkan bahwa hanya terdapat dua buah sekolah dasar untuk menampung seluruh anak usia sekolah dasar di wilayah desa.

1.4. Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

Jenjang Sekolah Menengah Pertama berperan penting dalam penuntasan program wajib belajar 9 tahun. Perkembangan ketersediaan unit SMP dan MTs di Desa Kepoh periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Jumlah Fasilitas Pendidikan SMP/MTs Menurut Status Pengelolaan di Desa Kepoh 2024–2025

Jenjang Pendidikan	2024 (Negeri)	2024 (Swasta)	2025 (Negeri)	2025 (Swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0	0	0	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Infrastruktur pendidikan jenjang menengah pertama belum tersedia di wilayah desa ini. Sepanjang periode pengamatan dari tahun 2024 hingga 2025, data menunjukkan ketiadaan absolut untuk fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik yang berstatus negeri maupun swasta. Tidak adanya fasilitas pada jenjang pendidikan ini mengindikasikan bahwa penduduk usia sekolah menengah pertama di desa tersebut harus mengakses layanan pendidikan dasar sembilan tahun di luar batas wilayah administrasi desa. Kondisi ini dapat menjadi catatan bagi perencanaan pembangunan desa atau pertimbangan zonasi pendidikan di tingkat kecamatan.

1.5. Fasilitas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/MA/SMK)

Pendidikan menengah atas merupakan jenjang lanjutan setelah pendidikan dasar 9 tahun yang mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Perkembangan ketersediaan unit SMA, MA, dan SMK di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 8. Jumlah Fasilitas Pendidikan SMA/MA/SMK Menurut Status Pengelolaan di Desa Kepoh 2024–2025

Jenjang Pendidikan	2024 (Negeri)	2024 (Swasta)	2025 (Negeri)	2025 (Swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah Menengah Atas (SMA)	0	0	0	0



Jenjang Pendidikan	2024 (Negeri)	2024 (Swasta)	2025 (Negeri)	2025 (Swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Madrasah Aliyah (MA)	0	0	0	0
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0	0	0	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 8, tidak terdapat fasilitas fisik SMA, MA, maupun SMK di dalam wilayah Desa Kepoh, baik yang berstatus Negeri maupun Swasta pada periode 2024–2025. Ketiadaan sekolah menengah atas di dalam wilayah desa mengharuskan lulusan SMP/MTs asal Desa Kepoh untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang berada di luar wilayah desa. Meskipun harus ditempuh ke luar desa, tingkat kemudahan untuk mencapai SMA/SMK terdekat berada pada kategori "Sangat Mudah". Hal ini didukung oleh ketersediaan fasilitas jalan utama desa yang sudah memadai dan dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.

KESEHATAN 2025

1

JUMLAH PRAKTIK TENAGA
KESEHATAN



0 DOKTER PRAKTIK
MANDIRI
0 BIDAN PRAKTIK
MANDIRI
0 PERAWAT PRAKTIK
MANDIRI

2

JUMLAH UPAYA KESEHATAN
BERSUMBERDAYA
MASYARAKAT
(SETAHUN TERAKHIR)

3 POSYANDU AKTIF

3 POSBINDU

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

KESEHATAN 2024

1

JUMLAH PRAKTIK TENAGA
KESEHATAN



0

DOKTER PRAKTIK
MANDIRI

0

BIDAN PRAKTIK
MANDIRI

0

PERAWAT PRAKTIK
MANDIRI

2

JUMLAH UPAYA KESEHATAN
BERSUMBERDAYA
MASYARAKAT
(SETAHUN TERAKHIR)

3

POSYANDU AKTIF

3

POSBINDU

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

2. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

2.1. Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan fisik yang berada di dalam wilayah desa berperan sebagai tempat pertolongan pertama dan pusat pelayanan kesehatan promotif serta preventif. Perkembangan jumlah unit fasilitas kesehatan di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Desa Kepoh 2024-2025

Jenis Fasilitas Kesehatan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit / RSAB	0	0
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0	0
Puskesmas Pembantu (Pustu)	1	1
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) / Polindes	1	1
Posyandu Aktif	3	3
Apotek / Toko Obat	0	0
Total Fasilitas Kesehatan	5	5

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Infrastruktur pelayanan kesehatan di tingkat desa menunjukkan kondisi yang stagnan, namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan medis dasar masyarakat. Berdasarkan perbandingan data tahun 2024 dan 2025, ketersediaan sarana kesehatan fisik

secara total menetap pada angka 2 unit. Fasilitas tersebut terdiri dari 1 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 1 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Polindes.

Sebagai tulang punggung pemantauan kesehatan ibu, anak, dan balita, desa ini memiliki 3 unit Posyandu yang secara konsisten berstatus aktif beroperasi dalam dua tahun terakhir. Meskipun pelayanan dasar telah terpenuhi, data juga memperlihatkan ketiadaan fasilitas kesehatan rujukan atau tingkat lanjut (Rumah Sakit dan Puskesmas). Lebih lanjut, absennya fasilitas Apotek atau Toko Obat mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap obat-obatan di luar layanan fasilitas kesehatan pemerintah masih harus bergantung pada pemenuhan dari luar wilayah desa.

2.2. Tenaga Kesehatan

Keberadaan tenaga medis di wilayah desa menentukan kualitas pelayanan dan Kecepatan penanganan masalah kesehatan warga. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan yang berpraktik atau bertempat tinggal di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Jumlah Praktik Tenaga Kesehatan Menurut Kualifikasi di Desa Kepoh 2024-2025

Praktik Tenaga Kesehatan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Dokter Praktik Mandiri	0	0



Praktik Tenaga Kesehatan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Bidan Praktik Mandiri / Desa	0	0
Perawat Praktik Mandiri	0	0
Tenaga Kesehatan Lainnya	0	0
Total Tenaga Kesehatan	0	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Ketidaktersediaan layanan ini terjadi secara merata pada semua profesi medis. Tidak ditemukan adanya dokter, bidan, perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya yang membuka praktik perseorangan di desa ini. Ketiadaan fasilitas praktik mandiri ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa kemungkinan besar harus sepenuhnya mengandalkan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang tersedia, atau harus melakukan perjalanan ke luar wilayah administrasi desa untuk mendapatkan akses pelayanan medis tambahan.

JUMLAH SARANA PRASARANA



EKONOMI TAHUN 2025



0

Kelompok
Pertokoan

0

Minimarket/ Swalayan
/Supermarket

0

Pasar



0

Restoran/
Rumah Makan

31

Warung/Kedai
Makanan Minuman

72

Toko/ Warung
Kelontong



JUMLAH SARANA PRASARANA



EKONOMI TAHUN 2024



0

Kelompok
Pertokoan

0

Minimarket/ Swalayan
/Supermarket

0

Pasar



0

Restoran/
Rumah Makan

28

Warung/Kedai
Makanan Minuman

69

Toko/ Warung
Kelontong



3. Fasilitas Perdagangan dan Ekonomi

3.1. Industri Mikro, Kecil, dan Jasa Ekonomi

Sarana perdagangan eceran berfungsi sebagai saluran distribusi barang kebutuhan pokok maupun sekunder bagi warga desa. Perkembangan jumlah unit sarana perdagangan di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Desa Kepoh 2024-2025

Jenis Sarana Perdagangan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Pasar dengan Bangunan Permanen/Semi Permanen	1	0
Pasar Tanpa Bangunan	0	0
Kelompok Pertokoan	0	0
Minimarket / Swalayan / Supermarket	0	0
Toko / Warung Kelontong	69	72
Warung / Kedai Makan Minum	28	31
Total Sarana Perdagangan	97	103

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Profil sarana perdagangan desa pada periode 2024 hingga 2025 memperlihatkan dinamika yang menarik antara aktivitas usaha skala mikro dan fasilitas perdagangan terpusat. Secara akumulatif, volume sarana perdagangan tumbuh secara positif dari 97 menjadi



103 unit. Pertumbuhan ini sepenuhnya ditopang oleh sektor wirausaha mandiri masyarakat, di mana unit usaha toko/warung kelontong bertambah 3 unit (dari 69 menjadi 72 unit), sejalan dengan usaha warung/kedai makan minum yang juga bertambah 3 unit (dari 28 menjadi 31 unit).

Di balik menggeliatnya pertumbuhan unit usaha mikro rumahan tersebut, terdapat catatan penting terkait hilangnya infrastruktur perdagangan yang berskala lebih besar. Fasilitas pasar dengan bangunan permanen atau semi permanen, yang pada tahun 2024 masih tercatat beroperasi sebanyak 1 unit, kini tidak lagi beroperasi atau tutup pada tahun 2025. Ditambah dengan belum adanya kelompok pertokoan maupun fasilitas ritel modern (swalayan/minimarket), pola perniagaan di desa ini tampak semakin terdesentralisasi dan sepenuhnya bertumpu pada perputaran ekonomi di warung-warung skala kecil yang tersebar di lingkungan warga.

3.2. Industri Mikro, Kecil, dan Jasa Ekonomi

Keberadaan industri mikro/kecil dan penyedia jasa ekonomi mencerminkan keragaman mata pencaharian serta potensi kewirausahaan di desa. Perkembangan unit usaha industri dan jasa di Desa Kepoh pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Jumlah Industri Mikro, Kecil, dan Sarana Jasa Ekonomi di Desa Kepoh 2024-2025

Jenis Usaha / Jasa Ekonomi	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Jumlah IMK	31	28

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) di desa menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 31 unit usaha IMK yang beroperasi. Angka ini mengalami penyusutan pada tahun 2025 menjadi 28 unit usaha. Berkurangnya 3 unit usaha ini menandakan adanya sedikit pelambatan pada aktivitas industri skala rumahan di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun terakhir.



DATA POTENSI DESA TAHUN 2025

1. Identitas Desa

1.1.	Nama Provinsi	:	Kepulauan Bangka Belitung
1.2.	Nama Kabupaten	:	Bangka Selatan
1.3.	Nama Kecamatan	:	Toboali
1.4.	Nama Desa	:	Kepoh
1.5.	Status Daerah	:	Perdesaan

2. Keterangan Umum Desa

2.1.	Topografi wilayah desa/kelurahan	:	Dataran
2.2.	Keberadaan permukiman penduduk di puncak/tebing/lereng	:	Tidak Ada
2.3.	Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut	:	Ada
2.4.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)	:	Ada
2.5.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)	:	Tidak Ada
2.6.	Pemanfaatan laut untuk : Tambak garam	:	Tidak Ada
2.7.	Pemanfaatan laut untuk : Wisata bahari	:	Tidak Ada
2.8.	Pemanfaatan laut untuk : Transportasi umum	:	Tidak Ada
2.9.	Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap hutan	:	Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan
2.10.	Fungsi kawasan hutan	:	Lindung dan Produksi

2.11.	Jumlah Rukun Warga (RW)	:	0
2.12.	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	:	12

3. Perumahan dan Lingkungan Hidup

3.1	Jumlah keluarga pengguna listrik PLN	:	903
3.2	Jumlah keluarga pengguna listrik Non PLN	:	19
3.3	Jumlah keluarga bukan pengguna listrik	:	4
3.4	Penerangan di jalan utama desa/kelurahan	:	Ada, Sebagian Kecil
3.5	Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan	:	Listrik Diusahakan Oleh pemerintah
3.6	Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga:	:	Elpiji 3 Kg
3.7	Kejadian pencemaran lingkungan: Air	:	Ada
3.8	Sumber pencemaran Air	:	Pabrik/ Industri/ Usaha
3.9	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan: Kejadian pencemaran Air	:	Tidak Ada
3.10	Kejadian pencemaran lingkungan: Tanah	:	Ada
3.11	Sumber pencemaran Tanah	:	Pabrik/ Industri/ Usaha

3.12	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan: Kejadian pencemaran Tanah	:	Tidak Ada
3.13	Kejadian pencemaran lingkungan: Udara	:	Tidak Ada
3.14	Sumber pencemaran Udara	:	-
3.15	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan : Kejadian pencemaran Udara	:	-
3.16	Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya oleh masyarakat desa/kelurahan	:	Tidak Ada kegiatan
3.17	Pengolahan/daur ulang sampah (reuse, recycle) oleh masyarakat desa/kelurahan	:	Tidak Ada kegiatan
3.18	Penggalakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian	:	Ada, Warga Terlibat
3.19	Pembuatan lubang biopori di desa/kelurahan	:	Tidak Ada
3.20	Pemanfaatan energi baru terbarukan (tenaga surya/angin/mikrohidro/biogas/biomassa /pasang surut/arus laut) di desa/kelurahan	:	Tidak Ada
3.21	Penerapan pola tanam (rotasi tanaman, tumpang sari dll) di desa/kelurahan	:	Ada, Warga Terlibat
3.22	Penampungan/pemanenan air hujan di desa/kelurahan	:	Ada, Warga Terlibat
3.23	Pembuatan atau pemeliharaan terasering di desa/kelurahan	:	Tidak Ada

4. Bencana Alam dan Mitigasi Bencana Alam 2024-2025

4.1	Banyak kejadian tanah longsor 2024	:	Tidak Ada
4.2	Korban jiwa tanah longsor 2024	:	Tidak Ada
4.3	Banyak kejadian tanah longsor 2025	:	Tidak Ada
4.4	Korban jiwa tanah longsor 2025	:	Tidak Ada
4.5	Banyak kejadian Banjir 2024	:	Tidak Ada
4.6	Korban jiwa Banjir 2024	:	Tidak Ada
4.7	Banyak kejadian Banjir 2025	:	Tidak Ada
4.8	Korban jiwa Banjir 2025	:	Tidak Ada
4.9	Banyak kejadian Banjir bandang 2024	:	Tidak Ada
4.10	Korban jiwa Banjir bandang 2024	:	Tidak Ada
4.11	Banyak kejadian Banjir bandang 2025	:	Tidak Ada
4.12	Korban jiwa Banjir bandang 2025	:	Tidak Ada
4.13	Banyak kejadian Gempa bumi 2024	:	Tidak Ada
4.14	Korban jiwa Gempa bumi 2024	:	Tidak Ada
4.15	Banyak kejadian Gempa bumi 2025	:	Tidak Ada
4.16	Korban jiwa Gempa bumi 2025	:	Tidak Ada
4.17	Banyak kejadian Tsunami 2024	:	Tidak Ada
4.18	Korban jiwa Tsunami 2024	:	Tidak Ada
4.19	Banyak kejadian Tsunami 2025	:	Tidak Ada
4.20	Korban jiwa Tsunami 2025	:	Tidak Ada

4.21	Banyak kejadian Gelombang pasang laut 2024	:	Tidak Ada
4.22	Korban jiwa Gelombang pasang laut 2024	:	Tidak Ada
4.23	Banyak kejadian Gelombang pasang laut 2025	:	Tidak Ada
4.24	Korban jiwa Gelombang pasang laut 2025	:	Tidak Ada
4.25	Banyak kejadian Angin puyuh/puting beliung/topan 2024	:	Tidak Ada
4.26	Korban jiwa Angin puyuh/puting beliung/topan 2024	:	Tidak Ada
4.27	Banyak kejadian Angin puyuh/puting beliung/topan 2025	:	Tidak Ada
4.28	Korban jiwa Angin puyuh/puting beliung/topan 2025	:	Tidak Ada
4.29	Banyak kejadian Gunung meletus 2024	:	Tidak Ada
4.30	Korban jiwa Gunung meletus 2024	:	Tidak Ada
4.31	Banyak kejadian Gunung meletus 2025	:	Tidak Ada
4.32	Korban jiwa Gunung meletus 2025	:	Tidak Ada
4.33	Banyak kejadian Kebakaran hutan 2024	:	Tidak Ada
4.34	Korban jiwa Kebakaran hutan 2024	:	Tidak Ada
4.35	Banyak kejadian Kebakaran hutan 2025	:	Tidak Ada
4.36	Korban jiwa Kebakaran hutan 2025	:	Tidak Ada
4.37	Banyak kejadian Kekeringan (lahan) 2024	:	Tidak Ada
4.38	Korban jiwa Kekeringan (lahan) 2024	:	Tidak Ada

4.39	Banyak kejadian Kekeringan (lahan) 2025	:	Tidak Ada
4.40	Korban jiwa Kekeringan (lahan) 2025	:	Tidak Ada
4.41	Banyak kejadian abrasi 2024	:	Tidak Ada
4.42	Korban jiwa Abrasi 2024	:	Tidak Ada
4.43	Banyak kejadian abrasi 2025	:	Tidak Ada
4.44	Korban jiwa Abrasi 2025	:	Tidak Ada
4.45	Sistem peringatan dini bencana alam	:	Tidak Ada
4.46	Sistem peringatan dini khusus tsunami	:	Tidak Ada
4.47	Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	:	Tidak Ada
4.48	Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	:	Tidak Ada
4.49	Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll. selama 3 tahun terakhir	:	Ada
4.50	Penggundulan hutan, hutan menjadi permukiman, kebun, tambang, dll dalam 5 tahun terakhir	:	Ada
4.51	Peningkatan Penggunaan pupuk kimia & pestisida dalam 5 tahun terakhir	:	Ada
4.52	Peningkatan perilaku kebiasaan membakar sampah dan membuang sampah di tempat ilegal dalam 5 tahun terakhir	:	Ada
4.53	Peningkatan jumlah pabrik dan industri dalam 5 tahun terakhir	:	Tidak Ada

4.54	Peningkatan jumlah warga yang memiliki kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dalam 5 tahun terakhir	:	Ada
4.54	Kelangkaan air karena kemarau panjang dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.55	Penduduk desa semakin sulit bertani (serangan hama, kemarau Panjang, menangkap ikan di laut (cuaca ekstrem), dst) dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.56	Penduduk desa kehilangan mata pencaharian yang bergantung pada alam (banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, dll) dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.57	Gangguan kesehatan (Pneumonia, Malaria, dan DBD) dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.58	Kerusakan rumah dan harta benda karena bencana terkait iklim (banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, karhutla, gel. pasang) dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.59	Gagal panen, kerusakan tanaman atau kematian ternak karena bencana terkait iklim dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil

5. Pendidikan dan Kesehatan

5.1	Jumlah TK negeri	:	0
5.2	Jumlah TK swasta	:	0
5.3	Jumlah RA/BA negeri	:	0

5.4	Jumlah RA/BA swasta	:	0
5.5	Jumlah SD negeri	:	2
5.6	Jumlah SD swasta	:	0
5.7	Jumlah MI negeri	:	0
5.8	Jumlah MI swasta	:	0
5.9	Jumlah SMP negeri	:	0
5.10	Jumlah SMP swasta	:	0
5.11	Jumlah MTs negeri	:	0
5.12	Jumlah MTs swasta	:	0
5.13	Jumlah SMA negeri	:	0
5.14	Jumlah SMA swasta	:	0
5.15	Jumlah MA negeri	:	0
5.16	Jumlah MA swasta	:	0
5.17	Jumlah SMK negeri	:	0
5.18	Jumlah SMK swasta	:	0
5.19	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri	:	0
5.20	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta	:	0
5.21	Jumlah Rumah Sakit	:	0
5.22	Jumlah Klinik Utama	:	0
5.23	Jumlah Balai Kesehatan		0
5.24	Jumlah puskesmas dengan rawat inap	:	0
5.25	Jumlah puskesmas tanpa rawat inap	:	0
5.26	Jumlah puskesmas pembantu	:	1
5.27	Jumlah klinik pratama	:	0
5.28	Jumlah praktek mandiri dokter	:	0
5.29	Jumlah praktek mandiri bidan	:	0
5.31	Jumlah poskesdes (pos kesehatan desa)	:	1
5.32	Jumlah polindes (pondok bersalin desa)	:	0
5.33	Jumlah apotek	:	0
5.34	Jumlah toko khusus obat/jamu	:	0
5.35	Jumlah posyandu aktif	:	3
5.36	Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali	:	3

5.37	Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih	:	0
5.38	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	:	3

6. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

6.1	Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui:	:	Darat
6.2	Jenis permukaan jalan yang terluas:	:	Aspal/Beton
6.3	Jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:	:	Sepanjang Tahun
6.4	Keberadaan angkutan umum:	:	Tidak Asa
6.5	Operasional angkutan umum yang utama:	:	-
6.6	Jam operasi angkutan umum yang utama:	:	-
6.7	Ketersediaan angkutan online (memesan angkutan online)	:	Tidak Ada
6.8	Sarana transportasi yang biasa digunakan dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	Kendaraan Pribadi
6.9	Jenis angkutan umum dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	-
6.10	Jenis angkutan umum yang utama dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	-
6.11	Sarana transportasi yang biasa digunakan dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	Kendaraan Pribadi
6.12	Jenis angkutan umum dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	-
6.13	Jenis angkutan umum yang utama dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	-

6.14	Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel	:	0 Keluarga
6.15	Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone	:	Sebagian Besar Keluarga
6.16	Jumlah menara Base Transceiver Station (BTS)	:	2
6.17	Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan	:	3 Jenis
6.18	Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan	:	Sinyal kuat
6.19	Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan:	:	5G/4G/LTE
6.20	Keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos:	:	Tidak Ada
6.21	Layanan pos keliling:	:	Tidak Ada
6.22	Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta:	:	Tidak Ada

7. Ekonomi

7.1	Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling):	:	Tidak Ada
7.2	Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling):	:	Ada
7.3	Jumlah Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, MANDIRI, BPD, BTN) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	0

7.4	Jumlah Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	0
7.5	Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	0
7.6	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang masih aktif	:	0
7.7	Jumlah Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha Mikro yang masih aktif	:	0
7.8	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/Kospin) yang masih aktif	:	0
7.9	Jumlah Koperasi Lainnya yang masih aktif	:	0
7.10	Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	Ada
7.11	Fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E) yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	Tidak Ada
7.12	Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	Tidak Ada
7.13	Fasilitas Kredit Usaha Bersama (KUBE) yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	Tidak Ada
7.14	Jumlah kelompok pertokoan	:	0
7.15	Jumlah Pasar dengan bangunan permanen	:	0
7.16	Jumlah Pasar dengan bangunan semi permanen	:	0
7.17	Jumlah Pasar tanpa bangunan	:	0
7.18	Jumlah minimarket/swalayan/supermarket	:	0
7.19	Jumlah Restoran/rumah makan	:	0

7.20	Jumlah Warung/kedai makanan minuman	:	31
7.21	Jumlah Hotel	:	0
7.22	Jumlah Penginapan	:	0
7.23	Jumlah Toko/warung kelontong	:	72
7.24	Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha	:	Pertanian
7.25	Komoditas utama dari sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan	:	-
7.26	Jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja)	:	28
7.27	Jumlah Sentra Industri	:	0
7.28	Produk Sentra Industri Terbanyak	:	-
7.29	Keberadaan produk barang unggulan/utama	:	Tidak Ada
7.30	Produk Makanan unggulan/utama desa	:	-
7.31	Produk Non Makanan unggulan/utama desa	:	-

8. Keamanan

8.1	Kejadian Perkelahian massal antar kelompok masyarakat	:	Tidak Ada
8.2	Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	:	Tidak Ada
8.3	Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	:	Ada
8.4	Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	:	Tidak Ada
8.5	Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	:	Ada

8.6	Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	:	Tidak Ada
------------	--	---	------------------

9. Keuangan dan Aset Desa

9.1	Keberadaan sistem informasi desa:	:	Tidak Ada
9.2	Penggunaan sistem keuangan desa:	:	Ada, diperbaharui
9.3	Jumlah unit usaha BUMDes	:	1
9.4	Tanah kas desa/ulayat	:	Ada
9.5	Tambatan Perahu	:	Ada
9.6	Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian, dll.)	:	Tidak Ada
9.7	Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, lapangan olah raga, dll.)	:	Ada
9.8	Hutan milik desa	:	Ada
9.9	Mata air milik desa	:	Tidak Ada
9.10	Tempat wisata/pemandian umum	:	Tidak Ada
9.11	Aset lainnya milik desa	:	Ada
9.12	Jumlah peraturan desa tahun 2024	:	5 buah

10. Keterangan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan

14.1	Keberadaan: Kepala Desa/Lurah	:	Ada
14.2	Umur Kepala Desa/Lurah	:	52 tahun
14.3	Jenis kelamin Kepala Desa/Lurah	:	Laki-Laki
14.4	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala Desa/Lurah	:	SMU/Sederajat
14.5	Keberadaan: Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Ada

14.6	Umur Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	32 tahun
14.7	Jenis kelamin Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Perempuan
14.8	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Diploma IV/S1
14.9	Jumlah aparatur pemerintahan: Sekretariat Desa/Kelurahan (kaur keuangan, dll)	:	3
14.10	Jumlah aparatur pemerintahan: Pelaksana Teknis (kasi kesejahteraan, dll)	:	3
14.11	Jumlah aparatur pemerintahan: Pelaksana Kewilayahan (Kadus, Ketua RT, dll.)	:	3
14.12	Jumlah aparatur pemerintahan: Pegawai desa/kelurahan lainnya (hansip, dll)	:	9
14.13	Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan	:	Ada
14.14	Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2024	:	7





DATA

Mencerdaskan Bangsa